

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 **17** 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : ①

TAHUN 2005

Harga Minyak Tanah di Bengkulu Meroket

BENGKULU - Harga minyak tanah pada tingkat pengecer di sebagian pedesaan di Provinsi Bengkulu, sejak beberapa pekan terakhir naik cukup tinggi mencapai Rp2.500-Rp4.200/liter, sedangkan persediaan semakin langka. Harga minyak tanah yang meroket tinggi itu terjadi di pedesaan pedalaman di wilayah Kabupaten Kaur dan sekitarnya, kata Warjan Sari, salah seorang pedagang minyak tanah di Desa Selika, Kecamatan Tanjung Kemuning, Kaur, Jumat (16/9). Menurut dia, tingginya harga minyak tanah itu, selain sangat sulit mendapatkannya, juga harus membeli pada pedagang tertentu dengan harga yang lebih tinggi dari biasanya Rp1.500/liter. Warjan mengaku membeli minyak tanah yang dijualnya tersebut antara Rp2.700-Rp3.600/liter ditambah ongkos angkut dari pembeli pertama ke desanya menghabiskan

biaya rata-rata Rp500/liter. Lebih menyulitkan lagi, sekalipun harga tinggi, minyak tanah yang dicari juga sering tidak ada. Bagi warga yang sangat membutuhkan minyak tanah terkadang kecewa karena sulitnya mendapatkan minyak tanah. Jurubicara Pemerintah Kabupaten Kaur Hanibal secara terpisah mengakui, persediaan minyak tanah di daerah itu akhir-akhir ini makin langka dan bahkan pernah kehabisan stok sampai dua tiga hari. Pada saat stok kosong, pedagang yang masih memiliki persediaan memanfaatkan untuk menaikkan harga sesuka hatinya. Untuk mencarinya ternyata lebih sulit dari jenis bahan bakar minyak lainnya. Akibat kelangkaan minyak tanah tersebut terlebih akan memasuki bulan puasa, ada sebagian warga beralih menggunakan kayu bakar sebagai pengganti minyak tanah. Sementara itu, harga bahan pokok di Kabupaten Kaur menjelang bulan puasa sudah mulai merangkak naik.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2005

Blok Cepu: Jawa Tengah Meninginkan Porsi 46 Persen

Semarang - Berkaitan dengan *participating interest* (PI) sebesar 10 persen untuk daerah atas pengelolaan Blok Cepu, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menginginkan proporsi pembagian sebesar 46 persen untuk Jateng dan 54 persen untuk Jawa Timur. Menurut Wakil Gubernur Jateng Ali Mufiz, Jumat (16/9) di Semarang, proporsi pembagian itu sudah melalui pertimbangan jumlah titik prospek yang ada di kawasan Blok Cepu sekarang.

"Kami telah bertemu Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) untuk membahas dan menentukan share pengelolaan Blok Cepu. Lewat pertemuan itu kami bisa mengetahui secara makro data-data deposit minyak disana, Sebenarnya data kandungan minyak di Blok Cepu bukan data yang baru lagi. Hanya saja data itu sudah dikembangkan oleh para pakar

pertambangan Indonesia," ujar Ali Mufiz.

Dikatakannya, Blok Cepu memiliki 29 titik persediaan (prospek) dan dari jumlah itu tujuh titik sudah terbukti memiliki cadangan minyak.

Sementara 22 lainnya harus diteliti soal kandungan minyaknya. Bila menggunakan dasar tujuh prospek yang telah ada kandungan minyaknya, maka proporsi pembagiannya masih harus dibuktikan lebih dulu.

IAGI lanjut Mufiz, memberikan formula pembagian 36:64 di titik prospek wilayah Bojonegoro.

Akan tetapi untuk 22 titik prospek yang ada, pihak Jateng menilai yang realistis adalah 46 persen untuk Jawa Tengah.

Pembuktian besarnya kandungan minyak di setiap titik prospek membutuhkan biaya pengeboran Rp 15 miliar. (su herdjoko)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 10											TAHUN 2005																			

Penyelundupan BBM Polda Kalbar Bangun 30 Pos Penjagaan

Pontianak—Kepolisian Daerah Kalimantan Barat membangun 30 pos penjagaan untuk mengantisipasi penyelundupan bahan bakar minyak (BBM) di darat maupun di laut yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia. Kapolda Kalbar Brigjen Pol. Nanan Soekarna kepada SH Kamis (15/9) menjelaskan, 30 pos itu dijaga selama 24 jam, terutama menjelang pengumuman kenaikan harga BBM 1 Oktober 2005.

Kelangkaan BBM mulai terjadi Pontianak dan sekitarnya. Kamis lalu, hampir seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) baru buka setelah pukul 09.00 WIB karena keterlambatan pasokan. Harga minyak tanah melonjak menjadi Rp 2.200/liter dari semula Rp 1.450/liter, bensin dari Rp 1.850/liter menjadi Rp 2.300/liter.

Kepala Pertamina Cabang Pontianak, Mochamad Iskandar, menegaskan Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara lain harus diawasi secara lebih ketat, karena perbedaan harga BBM di Indonesia dan Malaysia terlalu jauh sehingga rawan penyelundupan.

Sementara itu di Padang, Sumatera Barat, BBM jenis solar juga mulai langka sehingga banyak nelayan tidak bisa melaut. Sekitar 70 pemilik kapal di Pelabuhan Muara Padang tidak beroperasi sejak seminggu lalu. Rudi, nelayan setempat, mengatakan ia biasanya membutuhkan solar 10 liter. Untuk sekali melaut butuh modal Rp 15.000, dengan penghasilan bersih Rp 10.000 - Rp 15.000. Penghasilan ini akan semakin kecil bila harga premium nanti dipatok pemerintah sebesar Rp 3.400/liter.

Pembelian Dibatasi

Adapun kelangkaan minyak tanah yang masih terjadi di berbagai daerah, mendorong penjual untuk membatasi pembelian. Bahkan di beberapa wilayah di Makassar, setiap pembeli hanya boleh membeli paling banyak tiga liter. Itupun harganya sudah melambung menjadi Rp 1.500 hingga Rp 1.700 per liter.

Di Kabupaten Gowa yang berbatasan langsung dengan Kota Makassar, kejadian serupa juga terjadi. Sampai Sabtu (17/9) pagi ini antrean panjang warga dengan jejeran ratusan jerigen masih terlihat di Kelurahan Pangkabinanga, Kelurahan Tetebatu dan Desa Jene Tallasa, Kecamatan Pallangga.

Sedangkan di Bandung, Jawa Barat, pembelian dibatasi 5 liter. Seperti yang diberlakukan oleh pangkalan minyak tanah di kawasan Ciembeleit, dibatasi 3 - 5 liter. Sampai hari ini antrean panjang pembelian minyak tanah terjadi di Ciheulang Sekeloa, Sukajadi, Ciembeleit hingga ke Cibiru.

Mengenai para penimbun BBM akan ditindak tegas. Setidaknya, inilah yang akan dilakukan Polda Sulawesi Utara. Kapolda Sulut Brigjen Pol. Laurensius Bambang Sutiarto menegaskan akan mengawasi seluruh SPBU dan tempat penjualan BBM. Pihaknya juga telah menahan empat pengusaha minyak asal Bitung yang beberapa waktu lalu melakukan penimbunan BBM.

Dari Jambi dilaporkan, Gubernur Jambi Zulkifli Nurdin telah memberi batas waktu satu minggu kepada Pertamina Cabang Jambi untuk membereskan penyaluran BBM. Sebab berdasarkan laporan bupati dan wali kota se-Provinsi Jambi, terungkap mengenai ketidakberesan dalam penyaluran minyak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), Kabupaten Tebo, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Merangin. Sedangkan di Kabupaten Batanghari ada belasan pangkalan BBM "siluman" yang sudah beberapa tahun tidak menyuplai BBM untuk masyarakat setempat.

Sementara itu di Kendari, Sulawesi Tenggara, menurut pantauan SH di sejumlah SPBU, para pembeli bensin dengan jerigen tidak hanya yang menggunakan kupon tapi juga bagi mereka yang memberi uang Rp 10.000 per jerigen kepada petugas SPBU. Bahkan kupon dapat digunakan untuk beberapa kali.

(aju/eriandi/novie waladow/suriani/didit ernanto/
sri rahayu ningsih/agus sana'a)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 **17** 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 33

TAHUN 2005

Menggulung Mafia Minyak

Perang melawan jaringan pencuri dan penyelundup minyak tengah dikobarkan pemerintah. Di tengah kondisi prihatin kelangkaan BBM di dalam negeri, rencana kenaikan harga BBM, dan tingginya harga minyak dunia, masih ada yang tega mengail di air keruh.

Oleh: SRI HARTATI SAMHADI

Aktivitas penyelundupan dan perdagangan BBM secara ilegal dalam skala besar di Indonesia selama ini sering dikaitkan dengan mafia minyak, meski tak semua aktivitas ilegal tersebut dilakukan oleh jaringan terencana yang disebut mafia ini.

Soal keberadaan jaringan penyelundup atau mafia minyak ini, banyak orang sudah lama tahu. Namun yang sulit adalah membuktikan bahwa jaringan itu benar-benar ada dan melibatkan orang-orang yang namanya sering disebut-sebut selama ini. Seperti kata Direktur Utama Pertamina Widya Purnama, mafia minyak adalah suatu organisasi tanpa bentuk.

Dari laporan yang ada sejauh ini, tampaknya sindikat yang menyelewengkan dan menyelundupkan BBM di Indonesia bukan hanya terdiri dari satu kelompok. Dunia bisnis perminyakan yang dari luar kelihatannya begitu tertib, ternyata ibarat rimba belantara. Setiap kapling bisnis, ada yang berkuasa dan bermain.

Begitu saktinya mafia itu sehingga sulit diberantas. Mereka disinyalir punya keterkaitan dengan penguasa masa lalu maupun penguasa masa sekarang sehingga banyak upaya yang pernah dilakukan untuk membersihkan Pertamina mental.

Pada awal menjabat sebagai direktur utama Pertamina, janji pertama Widya Purnama adalah membasmi habis mafia minyak di Pertamina ini. Namun, rupanya itu bukan langkah semudah mengucapkan kata-kata. Buktiannya, hingga setahun ia menjabat, bahkan sampai ia akan diganti (kalau jadi), mafia itu tetap bercokol. Penyelewengan BBM di dalam negeri dan penyelundupan BBM ke luar negeri masih terus berlangsung hingga kini.

Bahkan, ada indikasi intensitas aktivitas ilegal ini semakin meningkat, dipacu oleh tingginya harga minyak mentah dan BBM di pasar internasional, serta rencana kenaikan harga BBM di dalam negeri. Bukan itu saja, modus operasinya pun semakin canggih. Jika dulu yang diselewengkan dan diselundupkan hanya BBM yang memang disubsidi, kini mi-

nyak mentah pun juga dicuri langsung dari pipa bawah laut milik Pertamina.

Untuk memerangi mafia minyak dan memotong mata rantai dalam pengadaan BBM ini, Pertamina di zaman Widya telah membuat aturan baru dalam tender pengadaan BBM. Dalam aturan baru ini, impor harus melalui kontrak jangka panjang dan disertai dengan dokumen asal barang (*certificate of origin*) dan dokumen pengapalan (*certificate of bill lading*). Kedua dokumen ini harus disertakan oleh setiap perusahaan yang ikut dalam tender pengadaan BBM di Pertamina.

Tetapi langkah ini ternyata tidak mampu menumpas aksi mafia. Penyelundupan BBM bersubsidi ke luar negeri juga terus berlangsung dari berbagai titik di sepanjang wilayah perairan Indonesia. Sebagian besar minyak ini dijual ke Singapura, namun pernah pula dilaporkan ada BBM bersubsidi yang diselundupkan ke Timor Leste. Sebagian dari BBM yang diselundupkan ke luar negeri masuk kembali ke Indonesia melalui impor Pertamina atau anak perusahaannya.

46

Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati mengatakan, kenaikan harga BBM akan berdampak pada kenaikan inflasi. Kendati tidak menyebut besaran kenaikan harga BBM, tetapi menurut Sri Mulyani, kenaikan harga itu akan berdampak pada kenaikan inflasi sebesar 3-5 persen selama tiga bulan ke depan. Inflasi setahunan (*year on year*) diperkirakan melebihi sembilan persen.

Namun, pemerintah akan berupaya menjaga agar inflasi tahun 2005 tetap berada di kisaran 8-9 persen. Langkah itu antara lain dengan melakukan intervensi pasar untuk mengamankan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang Lebaran dan tahun baru.

Dalam Diskusi Dialektika Demokrasi yang diadakan Koordinatoriat Wartawan DPR kemarin di Jakarta, yang dihadiri Happy Bone Zulkarnaen (F-PG), Ade Daud Nasution (F-PBR), Endin AJ Soefihara (F-PPP), dan Andi Rahmât (F-PKS), terungkap bahwa pandangan fraksi di DPR terhadap rencana pemerintah menaikkan harga BBM masih beragam.

F-PG dan F-PBR setuju, sementara F-PPP dan F-PKS masih menghitung risiko politiknya.

Happy menyatakan, secara tegas ia mendukung kenaikan harga BBM karena beban subsidi yang harus ditanggung negara sa-

ngat besar. Padahal, jika dana tersebut dibagikan kepada 32 provinsi, cukup untuk mengentaskan kemiskinan.

Ade Daud berpandangan senada. Dia mengusulkan pemerintah dan DPR segera membuat undang-undang tentang energi yang di dalamnya mengatur harga BBM sesuai harga di pasaran internasional.

Sementara itu, Endin dan Andi berpendapat berbeda. Keduanya berpendapat, kebijakan menaikkan harga BBM memiliki risiko politik yang besar. Endin menilai kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM merupakan cara konvensional. "Pertanyaannya, di mana reformasi ekonomi yang dijanjikan dulu," ucapnya.

Kenaikan harga BBM bisa menimbulkan risiko politik yang besar. "Karena itu, PPP pun sedang menghitung risiko politik internal. Kalau setuju dengan kenaikan harga BBM, apakah konstituen masih akan berpihak pada PPP?" katanya.

F-PKS pun, menurut Andi, belum menentukan sikapnya. Sebagai pendukung pemerintah, F-PKS berpandangan, kebijakan menaikkan harga BBM akan menimbulkan risiko politik pemerintah tidak lagi populer. Soalnya, kata Andi menambahkan, rakyat tidak terlalu peduli terhadap angka-angka tetapi mengacu pada kenyataan, harga naik dan mahal.

(OIN/ELY/SUT/HAR/INU/WIN/NIK)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input checked="" type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15						16 17 18 19 20 21 22 23			24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN : 1											TAHUN 2005

Harga BBM Bisa Naik 80%

Pandangan Fraksi di DPR Beragam

JIMBARAN, KOMPAS – Wakil Presiden Jusuf Kalla menegaskan, kenaikan harga bahan bakar minyak minimum 50 persen, bahkan bisa mencapai rata-rata 70 atau 80 persen. Menaikkan harga tetap dilakukan meski aksi penolakan mulai marak karena beban anggaran pemerintah semakin berat.

"Minimum 50 persen, tapi bisa saja menjadi 70 persen atau 80 persen," ujar Wakil Presiden saat menjawab pertanyaan pers di Jimbaran, Bali, Jumat (16/9).

Menurut Kalla, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) tetap akan diterapkan meskipun telah terjadi penolakan atas rencana tersebut. Ketetapan itu diambil karena pemerintah sudah tidak dapat menanggung beban subsidi

BBM yang mencapai Rp 100 triliun lebih. Subsidi itu sudah tidak tepat sasaran karena yang menikmati masyarakat ekonomi tinggi. "Yang mendapatkan subsidi orang-orang yang memiliki AC atau mobil. Kami sedang mempersiapkan program kompensasinya sebesar Rp 100.000 per keluarga," kata Kalla menambahkan.

Pemerintah telah menetapkan

pembagian subsidi langsung sebesar Rp 300.000 per keluarga miskin untuk menutupi kebutuhan minyak tanah selama tiga bulan. Diperkirakan, ada 15,5 juta keluarga miskin.

Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra menjawab pertanyaan pers di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta, kemarin mengatakan, pernyataan sejumlah menteri mengenai persentase kenaikan harga BBM yang akan diumumkan awal Oktober nanti merupakan bagian dari keterbukaan dan sosialisasi agar masyarakat siap-siap sebelum harga BBM itu benar-benar dinaikkan.

"Presiden (Susilo Bambang Yudhoyono—Red) sendiri dalam sidang kabinet sebelumnya me-

nyatakan, harga BBM baru diputuskan setelah kepastian penyaluran kompensasi BBM dari kenaikan Maret lalu benar-benar selesai. Presiden tak mau menaikkan harga BBM lagi kalau penyaluran yang kemarin belum selesai," ucapnya.

Terlampau

Sebelumnya DPR mengajukan dua alternatif subsidi BBM itu. Pertama, senilai Rp 113 triliun lebih tanpa kenaikan harga BBM, tetapi defisit anggarannya besar dan dana subsidi Rp 89,2 triliun dengan opsi kenaikan harga BBM sehingga defisit di bawah satu persen.

Pemerintah mengarah untuk mengambil pilihan kedua, menaikkan harga BBM dengan subsidi

Rp 89,2 triliun.

Dirjen Perbendaharaan Negara Mulia P Nasution mengatakan, realisasi dana subsidi BBM sampai 15 September 2005 yang mencapai Rp 78 triliun sudah melampaui target alokasi subsidi BBM setahun dalam APBN-P 2005 sebesar Rp 76,5 triliun.

Pemerintah, menurut Mulia, sudah tidak lagi memiliki uang untuk subsidi selama tiga bulan ke depan.

Pagu Rp 89,2 triliun itu, lanjutnya, sebenarnya sudah cukup, bahkan pemerintah bisa menyisihkan Rp 11 triliun untuk belanja tiga bulan. Uang tersebut harus dicukupkan sampai akhir tahun.

Menteri Negara Perencanaan

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 36

TAHUN 2005

TNI AL Siap Diaudit

Kisruh soal penyelundupan BBM juga sempat memunculkan sedikit ketegangan antara Pertamina dan pihak TNI AL. Pasalnya, Direktur Utama Pertamina Widya Purnama sempat menyebut Primer Koperasi TNI AL (Primkopal) sebagai pemasok solar ke kapal MV Thor Star yang ditangkap tim gabungan Mabes Polri dan Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya, 17 Agustus lalu.

Dari pemeriksaan terhadap 12 tersangka, diketahui 138 kiloliter solar yang dibawa kapal ini, 30 kiloliter dibeli secara sah dari Pertamina, sementara 108 kiloliter didapat dari Primkopal. Namun, sinyalemen keterlibatan oknum TNI AL di Primkopal Pangkalan Utama TNI AL III itu sudah dibantah oleh sejumlah pejabat TNI AL.

Panglima Armada RI Kawasan Timur, Yosafat Didik Heru menegaskan, sesuai laporan yang diterima, BBM itu memang milik TNI AL yang kebetulan salah satu kapalnya tengah naik dok. Sehubungan dengan itu, maka BBM yang ada harus dikeringkan. Pelaksanaan pengeringan itu diserahkan kepada perusahaan *tanker service* yang dikontrak TNI AL.

"Nah, *tanker service* inilah yang kemudian menjual BBM yang disedot dari kapal kami. Namun demikian, kebenarannya akan tetap kami buktikan," kata Didik.

Berhemat

Selama ini, menurut Widya, instansi TNI/Polri mendapat jatah BBM 800.000 kiloliter per tahun, atau sekitar 7 persen dari total volume penjualan BBM oleh Pertamina yang tahun ini besarnya 59,6 juta kiloliter. Tentang berapa sebenarnya kebutuhan BBM untuk institusi TNI AL setiap bulan atau setiap tahunnya, Kepala Dinas Penerangan TNI AL Laksamana Pertama A Malik Yusuf mengatakan, ia masih belum pasti apakah besaran angka itu merupakan hal yang bisa diketahui umum atau rahasia.

"Yang jelas, seluruh kebutuhan BBM TNI AL, mulai dari Armada RI Kawasan Barat, Armada RI Kawasan Timur, Komando Lintas Laut Militer, hingga Korps Marinir setelah dianggarkan untuk setahun, lalu diserahkan ke Markas Besar TNI untuk kemudian diajukan bersama kebutuhan TNI AD dan TNI AU," katanya.

Khusus untuk besaran angka penggunaan BBM TNI AL, Malik

mengatakan, tidak tabu untuk diaudit bila memang ada auditor yang ingin melakukannya.

Menurut Didik, TNI AL selama ini sudah berusaha menekan penggunaan BBM yang memang dianggap dapat memperbesar biaya operasional Angkatan Laut.

"Upaya itu sudah kita lakukan beberapa tahun belakangan ini, yakni dengan cara mengganti mesin-mesin lama pada kapal perang kita dengan yang baru sehingga kebutuhan BBM dari semula untuk operasi satu hari satu malam dapat menghabiskan 350 kiloliter, kini setelah diperbarui hanya sekitar 40-50 kiloliter. Bahkan kami juga lebih mengaktifkan kapal-kapal patroli yang jauh lebih mudah bermanuver yang keperluan BBM-nya hanya sekitar 25 kiloliter," ujarnya.

Selain mengganti mesin, juga dilakukan "Operasi Tunggu". Artinya, kapal perang kita tidak terus-menerus *mobile*, tetapi menunggu di titik-titik mudah untuk pelaksanaan pengawasan keamanan laut. Oleh sebab itu, menurut Didik, kalau mau dihitung, alokasi BBM yang diterima selama ini masih belum memenuhi kebutuhan yang sebenarnya.

(NIC)

44

Jumlah rumah tangga ini diperkirakan sekitar 6 juta RTM.

Penduduk yang mendekati miskin adalah mereka yang mengonsumsi antara 2.100 kalori-2.300 kalori ditambah PNM atau setara dengan Rp 175.000 per orang per bulan. Atau rumah tangga yang pendapatannya kurang dari Rp 700.000 per bulan.

Selanjutnya, data sebanyak 15,5 juta RTM itu akan diserahkan ke PT Pos Indonesia untuk dibuatkan kartu. Kartu inilah yang nantinya menjadi bukti bahwa mereka berhak menerima subsidi dari kompensasi kenaikan harga BBM sebesar Rp 100.000 per RTM per bulan.

“

Rumah tangga sangat miskin adalah yang berpendapatan kurang dari Rp 480.000 per bulan.

Uang akan diberikan dalam tiga bulan sekali untuk mempermudah administrasi. Pada tahap awal, uang akan diberikan bulan Oktober sebesar Rp 300.000 per RTM. Total untuk tahun 2005 diperlukan Rp 48 triliun.

Sekadar mempertahankan

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sri Mulyani Indrawati mengatakan, besarnya kompensasi yang diberikan itu tidak ditujukan untuk mengentaskan kemiskinan, melainkan mempertahankan status keluarga

Mekanisme Penyaluran Kartu Kompensasi BBM (KKB)

- ◆ Berdasarkan data hasil pendataan rumah tangga miskin, PT Pos Indonesia mencetak kartu KKB.
- ◆ PT Pos kemudian secara bertahap menyerahkan kartu KKB ke BPS kabupaten/kota untuk selanjutnya menyerahkan KKB kepada rumah tangga miskin pada 28 September-20 Oktober 2005.
- ◆ Sebelum penyerahan kartu ke rumah tangga miskin, mantri statistik dibantu Tim Taskforce BPS kabupaten/kota menyosialisasikan KKB di tingkat kecamatan kepada para lurah/kepala desa.
- ◆ Mantri statistik bersama lurah/kepala desa dibantu petugas lapangan melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap kebenaran keberadaan rumah tangga miskin calon pemilik KKB.
- ◆ Rumah tangga yang tidak cocok didrop KKB-nya, sebaliknya yang belum masuk dan ditemui di lapangan didaftar ulang untuk selanjutnya diusulkan untuk dibuatkan KKB-nya melalui mekanisme di atas.
- ◆ Bagi rumah tangga yang cocok selanjutnya KKB yang bersangkutan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa dan diserahkan dengan kemungkinan dua cara/pendekatan.
 - 1 Diserahkan langsung oleh petugas kepada rumah tangga miskin di tempat masing-masing.
 - 2 Semua rumah tangga miskin diundang dalam pertemuan di kantor lurah/kepala desa untuk bersama-sama menerima KKB.

Sumber: Badan Pusat Statistik



GUNAWAN

miskin agar tidak semakin merosot. "Uang itu benar-benar dimaksudkan sebagai kompensasi kenaikan harga BBM, terutama minyak tanah," katanya.

Penduduk yang mendapat subsidi diasumsikan berpendapatan Rp 150.000 per kapita per bulan. Konsumsi BBM mereka paling banyak untuk beli minyak tanah diperkirakan empat liter per bulan per orang. Jika satu keluarga lima orang, satu bulan mereka butuh 20 liter. Karena kenaikan BBM akan mengakibatkan kenaikan minyak tanah,

dan minyak tanah merupakan kebutuhan dasar, maka kenaikan harga diharapkan tidak membebankan. Jadi jika dulu harganya Rp 700 per liter, satu bulan sekitar Rp 14.000. Tetapi kenaikan harga minyak itu akan ditambah inflasi sekitar 3-5 persen.

Misalnya, total pendapatan Rp 700.000 per bulan, inflasi 5 persen atau sekitar Rp 35.000. Total pertambahan kebutuhan mencapai Rp 50.000-Rp 70.000 per bulan. Pertambahan itu masih bisa tertutupi dengan subsidi yang diberikan pemerintah.

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 **17** 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 21

TAHUN 2005

Orang Miskin Versi Pemerintah

Kontroversi Pendataan
Calon Penerima Subsidi
Harus Diakhiri

Orang miskin dan subsidi bahan bakar minyak. Dua kata yang sama sekali tidak berkaitan secara harfiah itu akhir-akhir ini begitu lekat, seakan sulit dipisahkan.

Bicara soal orang miskin pasti dikaitkan dengan subsidi BBM, demikian sebaliknya. Ada apa sebenarnya antara subsidi BBM dan orang miskin?

Oleh: RUNIK SRI ASTUTI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan, rencana kenaikan harga BBM akan diputuskan setelah Badan Pusat Statistik (BPS) menyelesaikan pendataan keluarga miskin yang akan menerima subsidi dari kompensasi kenaikan harga BBM. Pemerintah memberi batas waktu sampai dengan tanggal 20 September 2005, data itu sudah harus dilaporkan ke Presiden.

Hal itu mencerminkan betapa pentingnya data penduduk miskin sebagai pijakan pembuatan kebijakan bagi pemerintah. Konsekuensinya, sedikit kesalahan yang dilakukan BPS pasti akan berdampak demikian besar bagi masa depan bangsa.

Lantas, apa yang sudah dilakukan BPS? Akankah mereka mampu menjembatani keberadaan subsidi bagi masyarakat miskin?

Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Rusman Heriawan, Jumat (16/9) di Jakarta, mengatakan, pihaknya sudah menyelesaikan hampir 90 persen pendataan rumah tangga miskin (RTM). Jumlah rumah tangga miskin yang telah terdata secara nasional sampai dengan tanggal 15 September 2005 sebanyak 13,6 juta dari 814. 525 satuan lingkungan setempat (SLS) atau rukun tetangga.

Jumlah rumah tangga miskin

yang terdata itu hampir mencapai 90 persen dari total target yang diperkirakan sekitar 15,5 juta rumah tangga miskin, atau 62 juta jiwa penduduk. Dengan asumsi, satu rumah tangga beranggotakan empat orang.

Pendataan dilakukan di 30 provinsi mulai dari satuan lingkungan terkecil setingkat rukun tetangga ditambah hunian liar—tidak mencakup pengungsi yang ditampung di barak, tenda/kamp, dan penduduk tunawisma.

Tiga kategori

Menurut BPS, ada tiga kategori penduduk miskin, yakni sangat miskin, miskin, dan hampir miskin. Penduduk sangat miskin adalah penduduk yang konsumsinya kurang dari 1.900 kalori per orang per hari ditambah dengan pengeluaran non-pangan (PNM) atau senilai Rp 120.000 per orang per bulan. Rumah tangga sangat miskin adalah yang berpendapatan kurang dari Rp 480.000 per bulan. Menurut data BPS, jumlahnya 4 juta rumah tangga.

Sedangkan penduduk miskin adalah mereka yang kemampuan pemenuhan konsumsinya antara 1.900 kalori-2.100 kalori per orang per hari ditambah PNM atau setara dengan 150.000 per orang per bulan. Atau rumah tangga yang pendapatannya kurang dari Rp 600.000 per bulan.

43

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											

HALAMAN : 7

TAHUN 2005

KILAS BISNIS

Pertamina UP III Terapkan ISPS Code

JAKARTA (Suara Karya): PT Pertamina Unit Pemasaran III Jakarta akan meningkatkan pengawasan keamanan fasilitas pelabuhan BBM serta penanggulangan bencana lainnya sebagai bagian dari penerapan ketentuan *international ship and port security (ISPS) code*.

"Kita harapkan dengan adanya langkah peningkatan ini maka keandalan Pertamina dalam pengawasan kegiatan transportasi akan semakin lebih baik," kata Kepala Perkapalan Bandara dan Komunikasi Elektronika Pelabuhan Khusus Migas Tanjung Priok, Subagyo di sela latihan penerapan ISPS code di Jakarta, kemarin.

Diakuinya, prasarana dan peralatan di pelabuhan yang ada saat ini membutuhkan banyak perbaikan. Namun, Subagyo mengatakan, dengan keadaan yang ada saat ini pihaknya akan terus melakukan optimalisasi pengawasan dan penanganan bencana sehingga dapat lebih efektif. (Rully)

42

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE: LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN: 7

TAHUN 2005

PENGELOLAAN MIGAS

KKS Cepu Diteken Pekan Ini

JAKARTA (Suara Karya): PT Pertamina (Persero) dipastikan minggu ini segera menandatangani kontrak kerja sama (KKS) bersama dengan pemerintah dan ExxonMobil untuk pengelolaan Blok Cepu. Pihak Pertamina akan diwakili oleh PT Pertamina EP (Eksplorasi dan Produksi) Cepu yang akan menjadi anak perusahaan BUMN tersebut dalam mengelola Blok Cepu.

"Kemungkinan kalau tidak hari ini (16/9), dalam minggu ini akan ditandatangani kontrak KKS Blok Cepu yang diprakarsai oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral," kata Komisaris Pertamina, Martiono Hadianto di Jakarta, kemarin.

Penandatanganan ini dilakukan sebagai tindak lanjut disetujuinya PP Nomor 34 Tahun 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Martiono, setelah penandatanganan KKS ini, maka langkah selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan penandatanganan *joint operation agreement* (JOA) antara Pertamina dan Exxon. "Nah JOA ini hanya dilakukan oleh Exxon dan Pertamina, karena ini sifatnya teknis," ujar dia.

Dijelaskannya, isi kesepakatan yang akan ditandatangani dalam KKS ini tidak banyak berubah dari

kesepakatan sebelumnya. "Penandatanganan KKS akan disesuaikan dengan nota kesepahaman yang telah ditetapkan sebelumnya, karena Presiden juga sudah mewanti-wanti hal tersebut," ujar dia.

Menjawab pertanyaan kepemilikan wilayah tersebut yang sebelumnya merupakan wilayah kerja Pertamina, menurut Martiono, setelah adanya UU Nomor 22 Tahun 2001 yang telah di-review oleh Mahkamah

"Penandatanganan KKS akan disesuaikan dengan nota kesepahaman yang telah ditetapkan sebelumnya, karena Presiden juga sudah mewanti-wanti hal tersebut,"

Martiono Hadianto
Komisaris Pertamina

Konstitusi maka semua lapangan migas milik Pertamina wajib diserahkan kepada pemerintah.

Untuk operator nantinya, Pertamina dan Exxon akan diberikan kesempatan mengelola secara bergiliran. Kesempatan lima tahun pertama akan dipegang oleh Pertamina.

Di bagian lain, Pertamina juga telah mempersiapkan satu anak perusa-

haannya, yaitu Pertamina EP, sebagai *holding* hulu dan Pertamina EP Cepu khusus untuk mengelola lapangan Cepu.

Dalam siaran tertulisnya, Juru Bicara Pertamina M Harun mengatakan, Dirut PT Pertamina (Persero) Widya Purnama telah melantik jajaran direksi dan komisaris di PT Pertamina EP Cepu yang akan menjadi anak perusahaan BUMN tersebut dalam mengelola Blok Cepu.

"Pertamina EP Cepu yang dibentuk ini akan menjadi wakil Pertamina dalam KKS dan bertanggung jawab atas kelancaran operasional dan pengelolaan Blok Cepu," ujarnya.

Susunan direksi dan komisaris PT Pertamina EP Cepu adalah: Dirut dijabat Hestu Bagiyo dan Direktur Operasi Subijanto. Sebagai Komisaris Utama Pertamina EP Cepu adalah Widodo Sutoyo dan Komisaris Bambang Tjiptadi. Sedangkan Dirut PT Pertamina EP dijabat oleh Kun Kurnely, Subarkah Kustowo sebagai Direktur Operasi, Tri Siwindono Direktur Pengembangan Usaha dan Karyo Shantika Direktur Keuangan. Sedangkan susunan Dewan Komisaris PT Pertamina (EP), Komisaris Utama Mustiko Saleh, sementara SM Hari Kustoro dan Suprijanto selaku Komisaris. (Rully)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 **17** 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2005

TATA NIAGA MINYAK

Pertamina Diminta Klarifikasi Mark Up Impor BBM

JAKARTA (Suara Karya): Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Meneg BUMN) Sugiharto meminta Direksi PT Pertamina memberikan klarifikasi mengenai dugaan penggelembungan (mark up) dana pembelian bahan bakar minyak (BBM) impor, khususnya solar.

"Kementerian BUMN telah melayangkan surat pada direksi Pertamina, Senin (12/9), untuk menjelaskan tentang tata niaga BBM, terutama mengenai harga solar yang dinilai tidak wajar," kata Sugiharto di Jakarta, kemarin.

Dalam surat yang ditembuskan ke Presiden, Wapres, Sekneg dan DPR itu juga disebutkan mengenai permintaan pemerintah agar Pertamina melakukan klarifikasi mengenai penyelundupan dan pencurian BBM di Lawe-Lawe Balikpapan, Kalimantan Timur dan Batam.

Ketidakwajaran yang terlihat oleh Kementerian Negara BUMN, yakni mengenai perkiraan harga impor BBM yang jauh dari harga patokan Mid Oil Platts Singapore (MOPS). Un-

tuk itu, masalah ini harus diselidiki lebih lanjut.

Meskipun, harga di pasar spot minyak internasional selalu bergerak dan berubah setiap jamnya yang memungkinkan terjadinya kesalahan dalam penetapan harga, namun akan dilihat berapa jauh kesalahan itu. Apalagi sistem akuntansi pelaporan Pertamina mengenai impor BBM tidak berfungsi dengan baik. "Sudah ada 30 orang yang dilatih untuk program SAP ini dan bahkan telah menelan biaya miliaran, namun tidak ada hasilnya. Akhirnya negara dirugikan dengan kasus pembobolan dan penggelembungan dana ini," tuturnya.

Untuk menyelesaikan masalah di Pertamina ini, pemerintah akan memisahkan antara kegiatan hulu dan kegiatan hilir, sehingga akuntabilitas Pertamina dapat diperjelas. "Pertamina sebagai entitas bisnis harus untung seperti perusahaan minyak lainnya. Tapi fungsi lain sebagai pelayan publik juga harus diperhitungkan oleh pemerintah," kata Sugiharto.

Menyangkut tidak berfungsinya sistem audit teknologi di PT Pertamina yang menghabiskan biaya sekitar 10 juta dolar AS itu, Sugiharto mengatakan, pihaknya sedang meminta

klarifikasi dari direksi Pertamina.

Subsidi

Sementara itu, Dirjen Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, Mulia P Nasution mengatakan, subsidi BBM yang sudah dibayarkan pemerintah kepada Pertamina hingga Agustus 2005 ini mencapai Rp 78 triliun.

Besaran subsidi ini sudah melebihi jumlah yang ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) Perubahan I 2005 sebesar Rp 76,5 triliun. "Realisasi subsidi hingga Agustus mencapai Rp78 triliun. Juni sudah Rp 54 triliun, Juli dan Agustus kita set off (dibayar dengan piutang Pertamina) Rp 20 triliun dan kita bayar tunai Rp 4 triliun," kata Mulia.

Mengenai jumlah realisasi yang sudah melebihi target itu, Mulia mengatakan, angka itu kini sedang dibahas dalam APBN-P II 2005 yang telah memberikan dua alternatif angka subsidi BBM yaitu Rp 113,7 triliun dan Rp 89,2 triliun. "Angka yang akan kita gunakan adalah Rp 89,2 triliun, Jadi sampai akhir tahun masih ada dana untuk subsidi BBM. Mudah-mudahan cukup sampai akhir tahun," ungkapnya. (Yuliana)

40

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 8											TAHUN 2005																			

Total S.A. Setuju Turunkan Harga Bensin

Paris - Perusahaan minyak Prancis Total SA, Jumat (16/9) sepakat menurunkan harga bensin dan menambah investasi di sektor penyulingan setelah pemerintah mengancam untuk memperlakukan pajak tambahan kecuali perusahaan-perusahaan minyak meningkatkan kapasitasnya dan menurunkan harga.

Perusahaan minyak yang penjualannya menempati nomor empat di dunia membuat komitmen tersebut setelah bertemu dengan Menteri Keuangan Prancis Thierry Breton bersama para eksekutif perusahaan minyak lain di Paris.

CEO Total, Thierry Desmarest berjanji untuk menurunkan seluruh harga kepada konsumen Prancis dalam beberapa hari mendatang, dan akan menunggu lebih lama sebelum menaikkan harga untuk melindungi konsumen dari spekulasi.

"Kami akan menunggu dua sampai tiga minggu sebelum menaikkan harga," kata Jean-Paul Vettier, kepala pemasaran dan penyulingan Total. "Sebaliknya kami akan menurunkan

harga dalam beberapa hari."

Breton menyambut langkah Total, yang mengontrol seperlima pasar pompa bensin Prancis. "Konsumen akan lebih dilindungi," kata Breton dalam jumpa pers.

Namun Breton gagal memperoleh komitmen dari perusahaan minyak asing dalam pertemuan itu. Meski demikian dia mengatakan telah mencatat rencana yang dipaparkan BP PLC, Royal Dutch Shell PLC dan Esso, anak perusahaan Exxon Mobil Corp, untuk menginvestasikan sejumlah total 500 juta euro di Prancis dalam tiga tahun mendatang. Tidak jelas apakah rencana itu merupakan rencana baru.

Breton membantah anggapan bahwa intervensinya dapat mengganggu persaingan raksasa minyak Prancis, dan menekankan pemerintah lain juga berusaha mendorong industri untuk mengambil langkah terhadap harga dan investasi jangka panjang.

Meski komitmen Total menyebabkan harga bahan bakar lebih rendah dari rata-rata, Breton mengatakan dia yakin persaingan pengecer akan

didorong untuk menyesuaikan diri. Breton juga tampak puas dengan komitmen Total untuk meningkatkan investasinya di sektor penyulingan dan mengumumkan badan pemerintah yang baru akan dibentuk untuk memonitor harga minyak.

Untuk menghindari diberlakukannya pajak tambahan, Total berencana menanamkan 2,8 juta miliar euro (US\$ 3,4 miliar) pada sektor penyulingan selama lima tahun mendatang, lebih dari tiga kali investasi dalam lima tahun pertama.

Menjawab kekhawatiran pemerintah dalam hal kapasitas produksi domestik, diumumkan pula rencana senilai 800 juta euro (US\$ 978 juta) untuk membangun fasilitas peningkatan yang mengubah kelebihan bahan bakar berat menjadi bahan bakar otomotif.

Breton juga meminta perusahaan minyak mendukung penggunaan energi yang dapat diperbaharui termasuk bahan bakar alami (*biofuel*), pengganti bensin dan solar yang terbuat dari tanaman atau sampah organik. (ap/nat)

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 **17** 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 6

TAHUN 2005

Polisi Tangkap Pengoplos Oli Merek Ternama

JAKARTA — Hati-hati menggunakan oli untuk kendaraan Anda. Pasalnya, Jumat (16/9), polisi meringkus Herman Lim alias Jim, pengoplos oli ternama. Pelaku diduga telah menggunakan merek yang sama dengan merek terdaftar milik pihak lain serta juga melakukan penipuan dengan menjual oli bekas yang menggunakan label merek itu.

Penangkapan Herman bermula dari kecurigaan warga di Kampung Buaran RT 03 RW 02 Cakung Timur, Jakarta Timur tentang aktivitas di sebuah gudang. Saat petugas mendatangi dan hendak menggerebek gudang tersebut, pintu dalam keadaan terkunci dari dalam. Ke-

mudian kunci dipaksa dibuka. Di sana ditemukan 15 orang pekerja yang sedang melakukan pengoplosan.

Di dalam gudang juga ditemukan 828 drum berisi oli berbagai merek, produksi Pertamina, Shell, Esso, BP, dan Mobil Oil. Selain itu juga mesin Forklift dan satu mobil boks berisi oli. Di lantai dua terdapat gudang yang dipergunakan untuk mengecat atau memberi label merek drum kosong. Di sana ditemukan 776 drum kosong dengan berbagai merek dan kompresor.

Dari pemeriksaan terhadap karyawan, diketahui gudang pengoplosan ini sudah beroperasi sejak dua tahun lalu. Mereka

memindahkan oli dari drum bekas tanpa merek ke dalam drum yang sudah diberi merek.

Herman Lim mengatakan, usahanya ini sudah dilakukan sejak 2002. Ia mendapatkan bahan baku dari Pertamina dan sebagiannya lagi dari sales *Evalube*. Omset yang didapat dari usaha ini mencapai Rp 800 juta setiap bulannya. Oli palsu hasil produksi ini sebagian disimpan di Komplek Pergudangan Blok C No 29-30, Pluit, Jakarta Utara.

Dalam gudang kedua ini ditemukan ribuan drum oli dengan berbagai merek. Menurut keterangan Hendra Rusli alias Hansen, pengelola gudang, tempat itu sudah sejak 2001 menjadi

gudang penitipan barang asalkan membayar sewa.

Menurut Wakil Direktur Reskrim Poldam Metro Jaya, AKBP Agung Sabar Santoso SH, tindakan Herman ini sudah melanggar Pasal 24 ayat (1) jo pasal 13 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1984 tentang melakukan kegiatan industri tanpa izin. "Jika ada pengaduan dari pemilik merek yang asli, ia juga dapat dikenai pasal 90 UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek," katanya.

"Saya tidak tahu itu," ujar Herman ketika dikerubungi wartawan mengenai kegiatan pengoplosan dan penggunaan merek ternama. Ia mengaku pusing ditanya wartawan. ■ c34

38

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
-

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 16

TAHUN 2005

Rekayasa Industri Siap Kembangkan Biodiesel

JAKARTA—PT Rekayasa Industri sedang menyiapkan desain dan rancang bangun industri pengolahan minyak jarak untuk diproses menjadi biodiesel. Pengembangan biodiesel tersebut akan dijadikan proyek nasional guna mengatasi krisis energi yang semakin parah. Ini merupakan salah satu langkah pemerintah mencari sumber energi alternatif.

Sejauh ini PT Rekayasa Industri telah membangun pabrik biodiesel berbahan baku minyak jarak pagar. Namun skala produksinya masih relatif kecil, sehingga biaya produksinya relatif masih tinggi. Langkah serupa juga dilakukan PT

Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), dan beberapa perusahaan lainnya

Direktur Utama PT Rekayasa Industri, Triharyo Indrawan Soesilo, mengatakan pengembangan biodiesel tersebut hanya akan membantu memecahkan masalah kelangkaan BBM untuk sektor transportasi. Namun belum bisa menyelesaikan krisis energi listrik di dalam negeri secara menyeluruh.

Karena itu, dia merekomendasikan agar pemerintah mengembangkan energi panas bumi untuk membangkitkan tenaga listrik. "Indonesia menguasai 40 persen cadangan panas bumi dunia, sehingga bisa dikembangkan

menjadi sumber energi primer," kata Triharyo di Jakarta, Kamis.

PT Rekayasa Industri sejauh ini akan bertindak sebagai perancang pembangunan pabrik biodiesel. Sedangkan PT Perkebunan Nusantara dan PT Inhutani sebagai penyedia lahan bagi perkebunan tanaman jarak, sedangkan PT Pertamina bertindak sebagai pembeli dan distributor.

Sebelum ini PT Pertamina telah menyatakan kesanggupannya untuk menyerap seluruh biodiesel yang diproduksi—berapa pun besarnya—dan mendistribusikannya melalui stasiun pengisian bahan bakar (SPBU) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Biodiesel ini bisa dipasarkan melalui SPBU yang ada karena sifatnya memang sama dengan solar.

Biodiesel ini akan mampu menekan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) fosil yang cadangannya kian menipis. Karena itu diperlukan pengembangan biodiesel secara besar-besaran. Dengan pengembangan biodiesel dengan skala industri maka biaya produksi menjadi lebih rendah dan harga jual menjadi lebih murah.

Proyek Biodiesel ini akan dipresentasikan di hadapan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah pulang dari lawan ke luar negeri. ■ fir

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>																													
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM																												
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	(17)	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
HALAMAN : 8												TAHUN 2005																		

Kapolri Perintahkan Tindak Masyarakat Penimbun BBM

JAKARTA — Kapolri Jenderal (Pol) Sutanto mengingatkan kepada masyarakat yang dengan sengaja mengambil keuntungan pribadi dengan menimbun bahan bakar minyak (BBM) akan ditindak tegas secara hukum karena praktik-praktik tersebut mengakibatkan persediaan di masyarakat menjadi berkurang.

"Bagi mereka yang mencoba mencari keuntungan pribadi dengan menimbun BBM maka pihak kepolisian tidak segan-segan menindaknya," kata Kapolri kepada wartawan di Mabes Polri Jakarta, Jumat (16/9).

Kepolisian akan menangani kasus penyalahgunaan BBM secara intensif untuk mengamankan pasokan BBM di dalam negeri.

Dalam dua hari terakhir ini, Tim Penertiban BBM dari Samapta Polda Jabar sudah mengunjungi dan mengecek sebanyak tujuh lokasi, namun tidak ada indikasi ditemukan aktivitas penimbunan BBM. Operasi penertiban itu dilakukan di Jl Cipamokolan, dan pada Kamis siang

(15/9) digelar di lima lokasi lainnya yakni di Jl Soekarno Hatta depan PT Len Kecamatan Regol Kota Bandung, kawasan Gunung Batu, Jl Leuwigajah, serta melakukan peninjauan ke pangkalan minyak tanah di depan lapas Banceuy.

"Ada dua kemungkinan mereka tidak beroperasi, pertama karena tidak beroperasi lagi atau mereka 'tiarap' menunggu kesempatan untuk beroperasi. Namun, kami tidak akan memberi celah kepada mereka, dan bersama Pertamina terus mempersempit peluang penyimpangan distribusi BBM di lapangan," kata Dir Samapta Polda Jabar Kombes Pol HC Tukimin.

Tutupnya beberapa pangkalan liar seperti yang terkena operasi dalam beberapa hari ini, menurut Tukimin, merupakan bentuk keberhasilan operasi yang mereka gelar, artinya tidak ada kesempatan lagi bagi para pelaku 'kencingan' minyak tanah dan BBM untuk kembali beroperasi.

■ eye

36

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

- BISNIS INDONESIA
- INVESTOR DAILY
- KOMPAS
- KORAN TEMPO
- MEDIA INDONESIA
- NERACA
- PIKIRAN RAKYAT
- RAKYAT MERDEKA
- REPUBLIKA
- SUARA KARYA

- SUARA PEMBARUAN
- SINAR HARAPAN
- THE JAKARTA POST
- MAJALAH GATRA
- MAJALAH TEMPO
- MAJALAH FORUM
- MAJALAH PILARS
- MAJALAH TRUST
- O

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 **17** 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 16

TAHUN 2005

Sapta Indra Sejati Bantah Gunakan BBM Ilegal

JAKARTA — Perusahaan tambang batubara, PT Sapta Indra Sejati, membantah hasil investigasi Tim Terpadu pemanfaatan pengawasan dan pengendalian BBM (Timdu). Dalam hasil Timdu BBM disebut bahwa perusahaan tersebut terbukti telah menggunakan BBM solar ilegal sebesar 408,5 kilo liter sejak Januari hingga Juli 2005, yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 1,047 miliar.

Direktur Utama PT Sapta Indra Sejati, R Tjahyono Imanwan, mengatakan perusahaan yang dipimpinnya selalu mengikuti peraturan yang telah ditentukan oleh pemerintah terkait dengan konsumsi BBM untuk industri. "Kita selalu beli dari Pertamina dan itu diberikan secara resmi dengan harga tertentu. Kita tidak pernah beli solar dari SPBU atau tempat lainnya selain Pertamina," kata Tjahyono dalam jumpa pers yang digelar kemarin (16/9).

Untuk kebutuhan setiap bulannya, jelas Tjahyono, pihaknya mengajukan permohonan kuota konsumsi solar ke Pertamina sebesar 640 kilo liter. Namun dari kuota yang diajukan tersebut, kata Tjahyono, oleh Pertamina

hanya disetujui sebanyak 625 kilo liter per bulan selama periode Januari hingga Juni 2005.

Berdasarkan kuota yang diberikan Pertamina tersebut, jelasnya, perseroan mengajukan pemesanan kepada Pertamina dalam bentuk *purchase order* (PO) dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pertamina. Dalam hal pembayaran, tambah dia, pihaknya selalu melakukan pembayaran di muka, yaitu 12 hari sebelum solar dikirimkan oleh Pertamina, melalui transporter resmi yang ditunjuk oleh BUMN tersebut. "Ini berarti negara tidak dirugikan, karena pembuatan *delivery order* (DO) dilakukan setelah kita bayar lunas dimuka," ujarnya.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama Kepala Sub Timdu BBM Industri, Sumarko, menuturkan kekeliruan hasil investigasi Timdu tersebut lebih disebabkan oleh kesalahan membaca data yang dilakukan oleh anggota Timdu yang melakukan audit terhadap data pembelian dan konsumsi solar PT Sapta Indah Sejati. Dan dari hasil penghitungan audit Timdu tersebut, kata Sumarko, ada selisih antara jumlah pemakaian dan penerimaan.

Sumarko menuturkan data yang diberikan oleh PT Sapta Indra Sejati kepada pihak Timdu pada tanggal 17 Agustus lalu sudah lengkap dan tidak ada masalah. Disamping itu, kata Sumarko, selama proses audit berlangsung pihaknya terus melakukan kontak dengan pihak Sapta Indra Sejati. "Ini hanya faktor kesalahan melihat, di mana ada data yang terselip. Jadi kemudian selisih angka ini yang disampaikan oleh Timdu kepada rekan-rekan media massa pada Rabu (14/9) lalu," papar Sumarko.

Dengan adanya kejadian ini, Sumarko menegaskan, kedepannya diharapkan tidak ada lagi kesalahan audit yang dilakukan oleh Timdu. Sementara untuk tujuh industri lainnya yang berdasarkan hasil audit Timdu juga terbukti menggunakan BBM ilegal, menurut Sumarko, sudah tidak ada masalah. Dia juga mengatakan pada Senin (19/9) mendatang Timdu akan memanggil salah satu industri yang masuk ke dalam daftar pembeli BBM ilegal. Pemanggilan tersebut, jelas dia, terkait dengan perbedaan data antara yang disampaikan secara lisan dan tertulis. ■ c25

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
 DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST **SEPT** OKT NOV DES
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 **17** 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 21

TAHUN 2005

Terbongkar, Modus Baru Pencurian BBM

**Di Padang
 kelangkaan BBM
 menjalar cepat
 hingga ke desa-desa.**

INDRAMAYU—Polres Indramayu, Jawa Barat, mengungkap modus baru pencurian bahan bakar minyak (BBM). Pelaku mengambil sebagian muatan minyak mentah (*crude oil*) dari mobil tangki dan kemudian menggantinya dengan air.

Modus itu terungkap saat jajaran Polres Indramayu melakukan pemeriksaan terhadap mobil tangki nopol B 9693 OF, yang sebelumnya diamankan. Mobil itu ditangkap ketika mengantre untuk membongkar muatannya di terminal Pengumpul Pertamina Balongan.

Saat itu, dua petugas mengawasi mobil tangki yang akan menurunkan muatannya. Namun, mobil tangki yang dikemudikan Sunardi (47 tahun), warga Karawang itu, tetap saja tidak bergerak. Ketika didekati, ternyata mobil tersebut sudah ditinggal sopirnya.

Pengawas Produksi Daerah Operasi Hulu Jawa Bagian Barat Area Operasi Barat, Sudaryono, dari hasil pemeriksaan, terungkap bahwa mobil tangki punya PT Citra Putra Perdana (CPP) itu, memiliki sekat berupa terpal yang membelah bagian dalam mobil. Meskipun salah satu bagian tangki berisi minyak mentah, namun pada bagian lain ternyata berisi air.

Mobil tangki itu, kata dia, mengangkut minyak mentah yang diambil dari sumur

Muara Tawar, Tambun, Bekasi. Menurut rencana, minyak sebanyak 16 ribu liter itu dibawa ke terminal Pengumpul Pertamina Balongan.

Pihaknya telah pengambilan contoh minyak mentah maupun air dari dalam tangki, untuk kepentingan penyelidikan. *Sample* itu selanjutnya diperiksa di laboratorium Pertamina.

Pengawas PT CPP Wilayah Timur, Sucipto, mengemukakan kasus itu baru pertama kali terjadi di perusahaannya. "Perusahaan kami dirugikan dengan ulah sopir itu. Selain harus membayar klaim ke Pertamina, juga telah menghambat kegiatan pengangkutan minyak mentah," ujar Sucipto. lis

Sementara itu, Tim Buru Sergap Polsek Ilir Timur (IT) II Poltabes Palembang, mengungkap praktik penimbunan BBM di tepi Sungai Musi. Dari tiga lokasi penimbunan, polisi menyita 32 drum berisi solar, minyak tanah, dan premium (bensin).

Selain menyita BBM, menurut Kapolsek IT II, Iptu Boyke Karel Wattimenna, polisi juga menahan tiga pelaku penimbunan, yaitu Zainal Abidin (43), Fitriadi alias Fifit (28), dan Andi Mulya (34).

Menghilang

Sepanjang Jumat (16/9) kemarin, para sopir truk yang melintasi jalur Pantura, Tegal-Batang mengeluhkan hilangnya solar di sejumlah SPBU. Menurut mereka, tiap kali hendak mengisi solar di SPBU, selalu ada tulisan 'Solar Habis'.

Dari penelusuran *Republika*, hampir semua SPBU (sekitar 40 unit) yang ada di sepanjang jalur Pantura ke-

habisan solar. Sedangkan untuk jenis premium, tidak ada masalah.

Seorang pengelola SPBU menyatakan, solar habis sejak pagi. "Kami sudah telpon ke agen agar solar segera disuplai, tetapi tidak datang juga," kata Anto, petugas SPBU di Ulujami.

"Saya ingin mengisi solar sejak dari Tegal hingga di Ulujami ini, tapi tetap saja tak dapat. Semua SPBU kehabisan solar," seru Jarwoto, sopir truk yang ditemui saat istirahat di Ulujami.

Seorang staf di Pertamina Depo Tegal, mengatakan sebenarnya suplai solar normal, seperti hari-hari biasa. "Saya sendiri bingung, kenapa solar cepat habis di SPBU," katanya.

Di Padang, kelangkaan BBM bagai wabah. Menular dalam waktu singkat, satu kota ke kota lain terus ke pedesaan. Akibatnya para pengendara terpaksa mengantre barjam-jam di SPBU dan nelayan tak melaut lagi.

"Saya sejak kemarin mencari SPBU yang agak sepi, tidak ketemu, malah sekarang antrien makin panjang," kata Marzul Ilyas, pemilik mobil, di Padang.

Di sepanjang Muara Padang, Sungai Batang Arau, sekitar 100 unit kapal tonda milik nelayan, diparkir. Para awaknya kelihatan beramal-malasan di warung kopi. "Laut luas, solar tak ada, apa hendak dikata," kata salah seorang dari mereka.

Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sumbar, Mirwan Pulungan, menyebutkan nelayan di sepanjang pantai barat Sumbar sedang dibelit persoalan serius.

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input checked="" type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											
HALAMAN :											TAHUN 2005

Waktu Kenaikan Harga BBM Belum Ditentukan

Mahasiswa terus berunjuk rasa menolak kenaikan.

JAKARTA — Presiden belum memutuskan waktu kenaikan harga BBM kendati sudah diumumkan bakal dilakukan awal Oktober 2005. Pemerintah pun masih belum memutuskan besaran kenaikannya. Alasannya, masih terus dikaji dan menunggu realisasi penyaluran dana kompensasi kenaikan harga BBM pada 1 Maret 2005 lalu.

Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan waktu dan besaran kenaikan harga BBM yang muncul di media massa belakangan ini baru sebatas wacana. "Keputusan mengenai itu [kenaikan] belum diambil, tapi nanti pada akhirnya Presiden akan memutuskan dalam rapat kabinet," kata Yusril di kantornya, Jakarta, Jumat (16/9).

Yusril berjanji akan terus menyampaikan perkembangan rencana kenaikan harga komoditas yang sangat sensitif bagi rakyat ini, lantaran memang tak bisa dibendung lagi. Kata dia, pemerintah tak bisa lagi mempertahankan harga BBM seperti sekarang ini, mengingat harga minyak mentah dunia sudah di

atas 60 dolar AS per barel.

Awal pekan ini, Wapres Jusuf Kalla mengatakan kenaikan harga BBM akan dilakukan pada awal Oktober ini. Sementara Presiden mengaku sudah mengetahui perihal rencana waktu kenaikan itu.

Mengenai besarnya, Meneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Sri Mulyani, menjelaskan minimum 50 persen demi menekan defisit anggaran pada APBN di bawah satu persen. Ada dua opsi besaran subsidi BBM yang ditawarkan, yakni Rp 89,2 triliun dan Rp

113,7 triliun. Jika pemerintah memilih opsi pertama, kenaikan minimalnya mesti 50 persen.

Sejauh ini, Yusril menegaskan kebijakan Presiden masih tak berubah. Ia menjelaskan, kenaikan harga BBM tetap akan dilakukan awal bulan depan setelah penyaluran kompensasi BBM tuntas diberikan. Sedangkan pengertian waktu yang dimaksudkan Presiden terkait dengan tanggal pasti kenaikan itu resmi diumumkan dan diberlakukan.

Kemarin, Kalla kembali menegaskan kenaikan minimal harga

BBM tetap 50 persen. "Tapi, bisa jadi 70 atau 80 persen," tegasnya di Denpasar, Bali. Pada sisi lain, Kalla menyebutkan pemerintah menyiapkan dana kompensasi Rp 100 ribu per kepala keluarga.

Ketua DPR, Agung Laksono, menyarankan kenaikan kembali harga BBM dilakukan setelah Lebaran, November 2005, bukan Oktober 2005. "Secara pribadi, lebih baik menunggu habis Lebaran," kata Agung yang juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Ia mengingatkan penentuan waktu kenaikannya perlu juga melihat ketahanan kondisi keuangan negara untuk tetap memberikan subsidi BBM.

Aksi demonstrasi mahasiswa menolak rencana kenaikan harga BBM terus berlangsung. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bandung Raya melakukan aksi unjuk rasa dengan menyegel pompa bensin Cikapayang, di Jl Ir H Juanda, Bandung, kemarin. Mahasiswa yang terdiri dari BEM Unpad, KM ITB, BEM UPI, dan BEM STT Tekstil, menuntut pemerintah membatalkan rencana kenaikan harga BBM.

Di Jakarta, belasan mahasiswa demo di depan Istana Negara menolak kenaikan itu. Aksi serupa bergulir di berbagai kota seperti di Medan, Makassar, Semarang dan Surabaya. ■ djo/ant



Kenaikan Oktober, minimal 50 persen. Bisa lebih.

Jusuf Kalla
Wakil Presiden



Waktu dan besaran kenaikan masih wacana.

Yusril Ihza Mahendra
Mensesneg

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KODE : LISTRIK MINERAL, BATU BARA GEOLOGI
 MIGAS DAN PANAS BUMI UMUM

JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

HALAMAN: 2

TAHUN 2005

SINGKAT

AL Minta Terlibat Pengamanan Aset Pertamina

■ JAKARTA – Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Slamet Soebijanto mengatakan, pengamanan aset Pertamina di laut lepas harus dilakukan secara terkoordinasi. Pertamina harus melaporkan jalur-jalur distribusi dan titik-titik rawan kepada Angkatan Laut (AL) agar bisa dilakukan antisipasi terhadap tindak kejahatan yang timbul di laut lepas.

"Koordinasi sangat penting, tidak hanya dengan Pertamina tetapi juga dengan Departemen Perhubungan dan departemen-departemen lainnya. Saya juga meminta kepada masyarakat, seperti nelayan untuk memberikan informasi," kata KSAL usai menandatangani nota kesepahaman dengan Departemen Perhubungan yang diwakili Menteri Perhubungan Hatta Radjasa di kantor Menteri Perhubungan, Kamis (15/9).

Slamet juga menegaskan, titik-titik perbekalan Pertamina di laut juga harus diketahui oleh AL supaya tetap bisa melakukan koordinasi.

(emy/isf)

32

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input checked="" type="radio"/> SUARA KARYA	<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>										
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS	<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI	<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM									
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15						16 (17) 18 19 20 21 22 23			24 25 26 27 28 29 30 31		
HALAMAN :										TAHUN 2005	

KENAIKAN BBM

Pertamina Janji Cukupi Stok

JAKARTA (Suara Karya): Pertamina mengimbau masyarakat tidak melakukan pembelian secara berlebihan (panic buying) BBM yang dapat menimbulkan kelangkaan menjelang kenaikan harga BBM, Oktober mendatang. Aksi membeli untuk menimbun minyak, juga akan ditindak tegas secara hukum.

"Kami minta agar masyarakat tidak panik dengan membeli BBM secara berlebihan, karena Pertamina akan melayani permintaan BBM sesuai dengan kebutuhan masyarakat," kata General Manajer Pertamina Unit Pemasaran III Jakarta, Tjandra Putra Kelana, kepada wartawan, kemarin.

Tjandra menjelaskan, untuk kelancaran distribusi BBM, Pertamina telah menyiapkan stok BBM dan non-BBM di seluruh depot penimbunan, selain menyiapkan sarana dan fasilitas pengisian, termasuk menambah jam kerja operasional depot penimbunan BBM. "Meski ada lonjakan permintaan, kami masih memandang ini hanya bersifat sementara dan belum mengganggu persediaan yang ada," ujar dia.

Tjandra juga menjelaskan, untuk bulan ini pihaknya telah menetapkan pasokan premium sebanyak 11.751 kiloliter per

hari, minyak tanah 6.500 kiloliter per hari, dan solar 11.990 kiloliter per hari.

"Selain itu, agar distribusi tetap terjaga dengan aman, kami pun berkoordinasi dengan aparat Polri, pemda serta instansi terkait untuk mendukung kelancarannya," kata Tjandra.

Menyinggung mengenai aksi penimbunan yang diindikasikan dilakukan oleh oknum aparat maupun industri, menjelang kenaikan BBM bulan depan, Tjandra mengatakan, untuk wilayah kerjanya yang mencakup Jakarta, Banten dan Jawa Barat saat ini masih dalam tahap normal. Artinya tindakan tersebut tidak jelas terlihat. "Saya rasa, semua agen nakal saat ini tidak berani melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan," ujarnya.

Sementara itu Wapres Jusuf Kalla kemarin di Denpasar, Bali, menyatakan bahwa kenaikan harga BBM diperkirakan tidak akan melebihi 50 persen. (Rully)

31

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

BISNIS INDONESIA
 INVESTOR DAILY
 KOMPAS
 KORAN TEMPO
 MEDIA INDONESIA
 NERACA
 PIKIRAN RAKYAT
 RAKYAT MERDEKA
 REPUBLIKA
 SUARA KARYA

SUARA PEMBARUAN
 SINAR HARAPAN
 THE JAKARTA POST
 MAJALAH GATRA
 MAJALAH TEMPO
 MAJALAH FORUM
 MAJALAH PILARS
 MAJALAH TRUST

KODE : LISTRIK
 MIGAS

MINERAL, BATU BARA
DAN PANAS BUMI

GEOLOGI
 UMUM

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGST SEPT OKT NOV DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

HALAMAN : 17

TAHUN 2005

OPEC Bantah Anggapan Brown

LONDON — Organisasi Pengekspor Minyak (OPEC) mengaku terkejut dengan komentar penanggung jawab keuangan Kabinet Inggris, Gordon Brown, yang meminta OPEC bertanggung jawab atas kenaikan harga minyak dunia saat ini. Melalui sebuah wawancara dengan *BBC Newsnight Programme*, OPEC menegaskan kenaikan harga itu bukan karena kesalahan produsen minyak.

Para anggota OPEC telah meningkatkan kapasitas produksi dari produksi biasanya. Kenaikan harga minyak akibat meningkatnya kebutuhan minyak dunia yang tidak diimbangi dengan kapasitas produksi dunia sehingga muncul kesenjangan yang membuat harga minyak menjadi mahal.

OPEC juga menyatakan menyambut baik pendapat Brown yang meminta OPEC lebih terbuka dalam pengelolaan minyak dunia. OPEC meminta masalah ini bukan tanggung jawab produsen saja, tapi juga konsumen yang memiliki peran besar dalam penentuan harga.

"Fakta sudah membuktikan suplai tidak mampu memenuhi permintaan yang begitu besar," kata Adnan Shihab Eldin, sekjen OPEC pada *BBC*. Pihaknya masih mencari titik stabil untuk menetapkan harga.

Brown sebelumnya menyatakan OPEC telah gagal memenuhi kebutuhan akan minyak dunia menyusul meningkatkan kebutuhan minyak mentah dunia di Cina karena ekonomi negara tersebut tengah bangkit. Namun, OPEC khawatir akan terjadinya suplai berlebihan yang akan membuat harga minyak jatuh.

Untuk meningkatkan investasi pada bisnis pertambangan minyak, harga minyak dunia setidaknya mencapai 40 dolar AS per barel. OPEC sepakat bila harga ideal minyak berada pada kisaran 40 hingga 60 dolar AS per barel. "Kami masih mencari posisi harga yang dianggap stabil, diharapkan penetapan ini tidak memakan waktu lama," kata Eldin.

Harga minyak mentah menurun setelah OPEC memperkirakan terjadinya penurunan permintaan menyusul kenaikan harga yang membuat konsumen enggan membelanjakan dananya. Namun, produsen minyak terbesar di Amerika Selatan, Venezuela, memperingatkan harga minyak bisa mencapai 100 dolar AS per barel karena terbatasnya sumber alam yang tersedia. "OPEC hampir mencapai kapasitas produksi maksimumnya. Masalahnya cadangan minyak sudah semakin menipis. Ini benar-benar krisis," kata Presiden Venezuela, Hugo Chavez, dalam pertemuan puncak di New York.

Pada perdagangan di New York Mercantile Exchange (Nymex), minyak mentah diperdagangkan dengan harga 64,51 dolar AS per barel, turun 24 sen. Harga minyak brent pada pengiriman Oktober di London's International Petroleum Exchange turun 16 sen menjadi 63,50 dolar AS per barel. "Pemain pasar memperkirakan harga minyak mentah di Nymex akan terus menurun karena berkurangnya permintaan menyusul naiknya harga minyak," kata Ken Hasegawa, analis pasar modal dari Himawari CX. ■ ap/afp/hir

HUBUNGAN MASYARAKAT
DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

MONITOR BERITA

<input type="radio"/> BISNIS INDONESIA <input type="radio"/> INVESTOR DAILY <input type="radio"/> KOMPAS <input type="radio"/> KORAN TEMPO <input type="radio"/> MEDIA INDONESIA <input type="radio"/> NERACA <input type="radio"/> PIKIRAN RAKYAT <input type="radio"/> RAKYAT MERDEKA <input type="radio"/> REPUBLIKA <input type="radio"/> SUARA KARYA				<input type="radio"/> SUARA PEMBARUAN <input checked="" type="radio"/> SINAR HARAPAN <input type="radio"/> THE JAKARTA POST <input type="radio"/> MAJALAH GATRA <input type="radio"/> MAJALAH TEMPO <input type="radio"/> MAJALAH FORUM <input type="radio"/> MAJALAH PILARS <input type="radio"/> MAJALAH TRUST <input type="radio"/>							
KODE : <input type="checkbox"/> LISTRIK <input checked="" type="checkbox"/> MIGAS		<input type="checkbox"/> MINERAL, BATU BARA DAN PANAS BUMI		<input type="checkbox"/> GEOLOGI <input type="checkbox"/> UMUM							
JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31										
HALAMAN : 8											TAHUN 2005

OPEC Diminta Tahan Produksi

■ **CARACAS** - Venezuela tidak menghendaki Organisasi Negara-negara Eksportir Minyak (OPEC) meningkatkan produk mereka karena sejumlah anggota sudah mencapai kapasitas produksi guna mendorong output, kata menteri perminyakan negara itu.

"Seluruh negara anggota berproduksi dalam kapasitas maksimal," kata Menteri Rafael Ramirez, Rabu malam.

Ramirez mengatakan kepada kantor berita Bilivarian News Agency bahwa spekulasi terkait peningkatan produksi ini merupakan hal normal menjelang pertemuan OPEC, hari Senin pekan depan di Wina.

Sejumlah pengamat perminyakan memperkirakan OPEC akan menambah produksi guna menurunkan harga minyak yang terus melambung, dan Kamis kemarin berada di atas US\$ 65/barel.

Pejabat Sekjen OPEC Adnan Shihab Eldin mengatakan hari Kamis bahwa kelompok ini akan mempertimbangkan peningkatan batas atas produksinya hingga 2 persen pada pertemuan pekan depan.

Ramirez, yang juga direktur utama Petroleos de Venezuela S.A., atau PDVSA, usulan Venezuela lebih pada fokus memodernisasi penyulingan.

(ap/xha)

29